

**PERSEPSI KYAI NAHDLATUL ULAMA (NU) KABUPATEN DEMAK
TENTANG HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Politik
Pada Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Disusun Oleh:

Sudarmanto

NIM: 18102012071

**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERSEPSI KYAI NU KABUPATEN DEMAK
TENTANG HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Politik
Pada Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disusun Oleh:

Sudarmanto

NIM: 18102012071

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,



H. Agus Riyanto, S.IP., M.Si.

NPP. 04.01.1.0036

**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Persepsi Kyai Nu Kabupaten Demak Tentang Hubungan Agama Dan Negara*” telah di pertahankan dan disahkan di depan tim penguji.

Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wahid Hasyim Semarang

Pada Hari/Tanggal : Senin, 19 Agustus 2019
Pukul : 10.43 – 11.26 WIB.

Skripsi ini benar-benar karya penyusun,
Apabila di kemudian hari ditemukan penyimpangan-penyimpangan,
Penyusun bersedia bertanggungjawab atas segala konsekuensinya.

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. H. Agus Riyanto, S.IP., M.Si.

1.

2. Zudi Setiyawan, S.IP., M.Si.

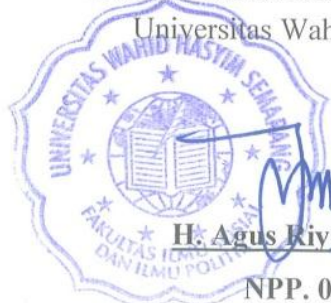
2.

3. Muhammad Nuh, S.Sos, M.Si.

3.

Jejara, 06 Mei 2018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wahid Hasyim Semarang



H. Agus Riyanto, S.IP., M.Si.

NPP. 04.01.1.0036

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUDARMANTO
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 24 Oktober 1984
NIM : 18102012071
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Judul Skripsi :

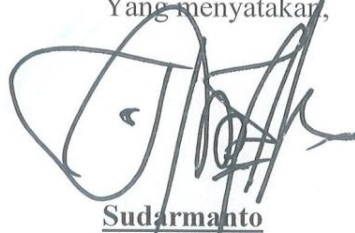
“Persepsi Kyai Nu Kabupaten Demak Tentang Hubungan Agama Dan Negara”

beserta isinya adalah benar-benar karya sendiri.

Dalam penulisan skripsi ini, dibuat oleh saya sendiri bukan hasil skripsi karya orang lain.

Jepara, 06 Mei 2018

Yang menyatakan,



Sudarmanto

NIM. 18102012071

MOTTO

“Berfikir Sebebas Mungkin Tapi Jangan Lupa Membaca”

(Gus Mus)

Tak Ada Kata Hambatan, Yang Ada Hanyalah Peluang

Tergantung Dari Sudut Mana Kita Memandang

Orang Berakal Adalah Orang Yang Mampu Mengikuti zamannya

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada,
Kedua orang tua tercinta, Bpk. Sudarto, Ibu Saodah, dan segenap keluargaku
Kepada istriku (Erna Zumrotun) dan kedua anakku (Fattah & Dhani)
Almamaterku Universitas Wahid Hasyim Semarang
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Politik

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah yang telah memberi rahmat, taufiq, serta hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Sholawat serta salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shollallahu'alaihi wa sallam karena beliau kita tahu betapa pentingnya mencari ilmu.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini sangat banyak kekurangan dan jauh dari pada sempurna. Hal tersebut tidak lain karena keterbatasan ilmu dan kemampuan penulis dalam mengeksplorasi pengetahuan.

Skripsi dengan judul "*Persepsi Kyai Nu Kabupaten Demak Tentang Hubungan Agama Dan Negara*" akhirnya dapat penulis selesaikan dengan segala bentuk kekurangan. Semoga skripsi yang penulis susun dapat memberi sumbangsih dalam dunia akademika maupun informasi mengenai studi yang penulis teliti.

Dalam proses selama kuliah sampai selesainya skripsi ini tidak lepas dari pada bantuan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak yang bersangkutan. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga segala bentuk kebaikan dari mereka di balas oleh Allah SWT dengan balasan yang lebih besar. Sungguh penulis tidak dapat memberikan balasan apapun kecuali do'a kepada mereka semua.

Terakhir semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semua pihak, bagi penulis khususnya bagi bangsa dan negara pada umumnya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan karya ilmiah ini, mungkin karena ketidak mampuan penulis menangkap pengetahuan dengan cepat, kurangnya berproses dalam mengasah kompetensi, kurangnya mengaplikasikan pengetahuan penulis sehingga mengalami banyak kekurangan. Penulis sangat berharap sekali adanya kritik dan saran dari berbagai pihak guna melengkapi dan menambah pengetahuan

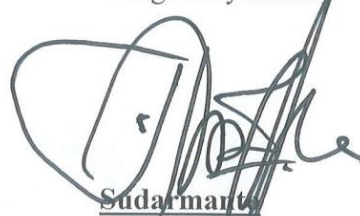
bagi penulis. Karena manusia tidak akan mampu menilai dirinya sendiri tanpa bantuan dari berbagai pihak.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Thoriq

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Jepara, 06 Mei 2018

Yang menyatakan,



Sudarman

NIM. 18102012071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Dasar Teori	11
1. Pengertian Kyai	12
2. Sejarah Berdirinya NU	15
3. Hubungan Agama dan Negara	21

F. Metode Penelitian	24
1. Jenis, Lokasi, dan Pendekatan	24
2. Sumber Data	25
3. Metode Pengumpulan Data	26
4. Teknik Analisis Data	27
G. Sistematika Penulisan	30
BAB II GAMBARAN UMUM KAB. DEMAK	31
A. Kabupaten Demak	31
B. Pondok Pesantren yang ada di Demak	35
C. Nasionalisme Kyai	37
BAB III HASIL DAN PENELITIAN	43
A. Persepsi Kyai NU tentang Hubungan Agama dan Negara	46
B. Peran Agama dalam Mempertahankan Keutuhan Negara	52
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Diskursus mengenai relasi agama-negara dalam konsepsi Islam nampaknya terus menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan. Pembahasan mengenai agama dan negara merupakan hal yang menjadi topik tersendiri bagi berbagai pihak. Sekalipun Indonesia bukan sebagai negara yang berdasarkan agama, tetapi pemerintah memberikan perhatian yang sedemikian luas dan besar terhadap kehidupan beragama. Lebih dari itu, pelaksanaan ritual agamapun mendapatkan perhatian dan pelayanan dari pemerintah. Seperti misalnya penyelenggaraan ibadah haji, puasa di bulan ramadhan, pemerintah ambil bagian dalam penentuan awal dan akhir bulan ramadhan.

Berbagai pendapat dari berbagai tokohpun bermunculan membicarakan soal tersebut; apakah dalam Islam diatur kehidupan berpolitik dan bernegara, atautkah Islam sebagai suatu agama, atau agama sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah politik dan negara. Terlepas dari perdebatan di atas, kenyataannya umat Islam selalu membutuhkan sebuah sistem negara yang Islami. Karena bagaimanapun, untuk mengamalkan suatu kebijaksanaan diperlukan suatu kekuatan (institusi politik).

Demak merupakan salah satu kabupaten yang hampir mayoritas penduduknya memeluk Agama Islam, walaupun begitu sistem pemerintahannya tidak menggunakan sistem islami seperti zaman Nabi.

Berangkat dari sinilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *Persepsi Kyai Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Demak Tentang Hubungan Agama Dan Negara*.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui persepsi Kyai NU Kabupaten Demak tentang hubungan Agama dan Negara menurut pandangan para kyai yang satu dan lainnya.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif yang datanya di peroleh dari lapangan dengan cara wawancara. Lokasi penelitiannya di Kabupaten Demak. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah fenomenologis. Pendekatan fenomenologi adalah upaya mencari berbagai perspektif, serta apa-apa yang dapat dipahami dari realitas yang terkandung dalam ajaran agama yang esensial.

Dari penelitian yang sudah dilakukan sesuai dengan metode, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kyai NU di kabupaten Demak sependapat bahwa agama dan Negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dengan agama Negara akan tentram karena agama mengajarkan pendidikan moral, di dalam agama pula di ajarkan cinta tanah air, menanamkan jiwa nasionalisme bagi para pemeluknya, mengajarkan gotong royong, saling menghormati, saling mengasihi, dll. Bayangkan ketika warga Negara Indonesia tidak di bekali sebuah ajaran-ajaran tersebut mungkin Indonesia akan mengalami gonjang-ganjing, mungkin warga Indonesia akan saling bermusuhan bahkan saling membunuh demi kekuasaan.

Kata kunci: Persepsi Kyai NU, Sejarah NU, Demak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus mengenai relasi agama-negara dalam konsepsi Islam nampaknya terus menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan. Pembahasan mengenai agama dan negara merupakan hal yang menjadi topik tersendiri bagi berbagai pihak. Dalam suatu negara kehidupan beragama menjadi pilihan bagi warganya karena hal tersebut merupakan hak asasi bagi setiap manusia. Namun dalam menjalankan kehidupan bernegara, menghubungkan antara agama dan negara menjadi polemik di antara berbagai pihak yang lain.

Para ilmuwan dalam dekade terakhir ini termasuk ilmuwan Indonesia sering mendiskusikannya. Agama di negeri ini diposisikan pada tempat yang sangat strategis. Sekalipun disebutkan bahwa Indonesia bukan sebagai negara yang berdasarkan agama, tetapi pemerintah memberikan perhatian yang sedemikian luas dan besar terhadap kehidupan beragama. Sejak lahir, pemerintah negara ini menunjuk satu departemen tersendiri yang bertugas melakukan pembinaan dan pelayanan terhadap semua agama yang ada, yaitu Departemen Agama. Lebih dari itu, pelaksanaan ritual agamapun mendapatkan perhatian dan pelayanan dari pemerintah. Seperti misalnya penyelenggaraan ibadah haji, puasa di bulan ramadhan, pemerintah ambil bagian dalam penentuan awal dan akhir bulan ramadhan. Demikian pula pada peringatan hari besar keagamaan, semua agama, dijadikan sebagai hari libur nasional. Lebih dari itu, simbol keagamaan misalnya mulai dari yang paling sederhana, bahwa hampir setiap pejabat pemerintah tatkala

memulai pidato memberikan nuansa agama, misalnya mengucapkan salam dan memuji Tuhan, dengan menggunakan cara Islam bagi pejabat muslim, dan begitu pula bagi agama lainnya Ayat-ayat suci al Qur'an banyak disitir atau dijadikan referensi dalam berbagai pidato oleh para pejabat pemerintah.¹

Berbagai pendapat dari berbagai tokohpun bermunculan membicarakan soal tersebut; apakah dalam Islam diatur kehidupan berpolitik dan bernegara, atautkah Islam sebagai suatu agama, atau agama sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah politik dan negara.

Terlepas dari perdebatan di atas, kenyataannya umat Islam selalu membutuhkan sebuah sistem negara yang Islami. Karena bagaimanapun, untuk mengamankan suatu kebijaksanaan diperlukan suatu kekuatan (institusi politik). Sekedar contoh, untuk menegakkan keadilan, memelihara perdamaian dan ketertiban, mutlak diperlukan suatu kekuasaan, apakah itu organisasi politik atau negara.² Andaikata kebijakan itu mengacu pada tegaknya ajaran Islam maka perangkat-perangkat peraturannya seharusnya yang Islami pula. Akan menjadi suatu hal yang kurang tepat apabila hendak menegakkan prinsip-prinsip Islam tetapi menggunakan sistem yang non Islami.³

Sejak lima tahun terakhir, wacana Islam Indonesia menghentak republik ini dengan menawarkan wacana baru yang sangat kontradiktif dengan wacana Islam *mainstream* yang cenderung revivalis, monolit, formalis syariah sehingga

¹ [https://www.academia.edu/12499884/Makalah Hubungan Agama dan Negara](https://www.academia.edu/12499884/Makalah_Hubungan_Agama_dan_Negara), diakses pada tanggal 31 Juli 2019

²Budiardjo Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm. 8-9.

³Hussain Syaukat, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj. Abdul Rochim CN., Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 16.

mengarah intoleran karena tidak ada kompromi disana. Wacana Islam yang agak berbeda dengan wacana Islam *mainstream* ini memang tidak muncul tiba-tiba, telah tumbuh mulai tahun 1960-an. Wacana Islam baru tersebut adalah Islam liberal.⁴

Kalau kita mau mencermati fenomena keagamaan Islam di Indonesia beberapa tahun terakhir ini tampak ada kecenderungan sebagian umat Islam Indonesia yang ingin menunjukkan “autentisitas Islam” yang menurut mereka sesuai dengan *blue print* (cetak biru) yang diajarkan Nabi Muhamad SAW. Isu sentral yang mereka munculkan adalah seputar perlunya mendirikan khilafah Islamiyah (Negara Islam) dan formulasi syariat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Para pengusung “autentisitas Islam” ini mengandaikan Islam sebagai sebuah agama yang sudah final, sempurna, dan selesai seiring dengan rampungnya misi kerasulan Nabi Muhamad. Dengan demikian, seluruh muatan kitab suci dan segala yang pernah diajarkan dan yang dipraktikan Nabi Muhamad harus dijiplak sesuai dengan *master plan* yang sudah ada tanpa melihat dan mempertimbangkan konteks sosio, kultural, historis.

Pandangan demikian tidak sepenuhnya salah, hanya saja pada gilirannya menempatkan semua aspek ajaran Islam sebagai wilayah tak tersentuh karena dianggap sakral, rigit, dan baku. Selanjutnya, kita hanya sebatas mengiyakan, mengikuti, tanpa diperkenankan mengembangkan mengutak-ngatik, menyangkal apalagi mengubahnya. Sikap sakralisme terhadap semua ajaran agama tanpa

⁴. Qodir Zuli, *Islam Liberal Paradigma Baru Wacana dan Aksi Islam Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, halm 163

dibarengi daya kritisme ilmiah akan melahirkan sikap merasa paling benar terhadap apa yang dipahami serta menyalahkan, bahkan yang paling ekstrem, mengafirkan orang yang beda paham dengannya. Lebih jauh, sikap demikian pada gilirannya akan menimbulkan perpecahan intern umat Islam, bahkan antar umat beragama.⁵

Indonesia menjadi negara yang merdeka lebih dari setengah abad. Dalam perjalanan bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga sekarang, kajian mengenai hubungan antara agama (Islam) dan negara masih menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan. Kajian ini telah menjadi titik pusat perhatian gerakan Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim juga mengalami permasalahan mengenai hubungan agama dan negara. Munculnya kaum – kaum yang menuntut pemerintahan Islam juga menjadi hal yang harus dapat ditangani oleh bangsa ini. Setidaknya ada tiga hal yang menjadikan kajian ini menarik untuk diperhatikan. *Pertama*, terdapatnya perbedaan pendapat diantara tokoh-tokoh umat Islam dalam memandang hubungan antara Islam dan Negara. Dalam diskursus pemikiran politik Islam, terdapat tiga paradigma pola hubungan agama (Islam) dengan negara. 1.) Paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan (*intergrated*). 2.) paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan suatu yang saling terkait dan berhubungan (*symbiotik*). 3.) paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara harus terpisah (*secularistic*). Keragaman pemikiran di antara tokoh-tokoh umat Islam inilah yang kemudian

⁵ Rodli Ahmad, *Stigma Islam Radikal*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2013, hal 1-2

memunculkan benih-benih perpecahan di kalangan umat Islam. *Kedua*, Konstitusi atau undang-undang Dasar yang diterapkan di negara ini tidak didasarkan pada Islam, padahal Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk. Hal ini telah mempengaruhi tentang bentuk negara Indonesia yang bukan negara Islam. *Ketiga*, munculnya bentuk-bentuk perjuangan menegakkan syariat Islam dengan menggunakan pendekatan yang berbeda diantara kelompok satu dengan lainnya. Perbedaan bentuk perjuangan penegakan syariat Islam di Indonesia semakin tampak pada era Reformasi sekarang ini.⁶

DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) Gerakan politik yang dimaksud disini bukanlah mengarah pada partai politik dan juga gerakan memenangkan sebuah pemilihan umum, tapi lebih kepada gerakan politik yang berawal dari sebuah keyakinan terhadap ideologi atau nilai-nilai dan berdasar pada kesamaan itu berusaha untuk menjadikan nilai atau ideologi tersebut menjadi kebenaran yang diakui oleh semua orang, dalam hal ini hukum Islam. DI/TII didirikan Kartosoewirjo pada tahun 1949 - 1962 ini adalah merupakan sebuah gerakan politik Pertama, didirikannya gerakan DI/TII sebagai bentuk kekecewaan terhadap kepemimpinan Soekarno. Jelas dapat kita lihat, bahwa tujuan dari Kartosoewirjo adalah ingin menjadikan ajaran Islam sebagai landasan Negara, dan menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam. Namun, permasalahan yang dihadapi oleh Kartosoewirjo tidaklah mudah dalam mencapai tujuan tersebut. Harus diakui bahwa memang Indonesia tidaklah semuanya merupakan umat Islam

⁶ Seiawan Zudi, *Nasionalisme NU*, CV. Aneka Ilmu Jl. Raya Semarang – Demak, 2007, hal 14-15

dan pemerintahan yang sah pun telah dibentuk dengan Soekarno sebagai presidennya.⁷

Selain itu ada Jamaah Ansharut Daulah (JAD), adalah sebuah kelompok militan Indonesia yang dilaporkan memiliki kaitan dengan pengeboman Surabaya pada tahun 2018. Negara Islam Irak dan Suriah telah mengklaim bahwa mereka bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Pada tahun 2017, kelompok ini telah diakui sebagai organisasi teroris oleh Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat.⁸

Berbagai wacana gerakan formulasi syariat Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan juga dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pembahasan tentang HTI disini perlu dikhususkan karena didasari oleh tiga pertimbangan. *Pertama*, HTI merupakan bagian dari jaringan Hizbut Tahrir (HT) sebuah partai politik sekaligus gerakan Islam yang bergerak secara internasional di lebih dari 40 Negara. *Kedua*, HTI selama ini terlihat paling genjar dalam mengkampanyekan penegakan syariat Islam. *Ketiga*, karena hanya HTI yang selama ini berani mengusung tuntutan perjuangan “pembentukan khilafah Islamiyah” yang ingin menyatukan seluruh dunia Islam berada dalam satu bingkai negara Khilafah. Dalam menjalankan aktifitasnya, HTI selama ini tidak pernah menggunakan cara-cara kekerasan dan pemaksaan kehendak, sebagaimana yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI).

⁷ Wahyu Irwansyah Tambunan, Jurnal POLITEIA *Gerakan Politik S.M. Kartosoewirjo(DI/TII 1949-1962)*, (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2013), Hal. 33.

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Jamaah_Ansharut_Daulah, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019, pukul 14:02 WIB

HT didirikan pada tahun 1953 di Al-Quds (Yarusalem) Palestina oleh Syaikh Taqiyudin An-Nabhani (1908-1977). Syaikh Taqiyudin An-Nabhani merupakan seseorang pemikir sekaligus politikus ulung. Ia juga adalah seorang Qadli pada Mahkamah Istinaf (Mahkamah Banding) di Al-Quds.

Paradigma keagamaan HT dalam memandang relasi antara Agama dan Negara dapat digolongkan kedalam paradigma formalistik (integralistik). Bagi HT, syariat Islam telah mengatur segala urusan tanpa terkecuali, baik mengenai hubungan manusia dengan penciptanya, seperti shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, kemudian hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, seperti dalam urusan pakaian, makanan, akhlak, dan sebagainya, juga hubungan manusia dengan sesamanya, seperti dalam urusan pakaian, makanan, akhlak, dan sebagainya, juga hubungan manusia dengan sesamanya, seperti dalam urusan pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, politik luar negeri dan lain-lain. Hizbut Tahrir memandang bahwa syariat Islam sesungguhnya meliputi keyakinan spiritual (aqidah ruhiyyah) dan ideologi politik (aqidah siyasiyyah). Oleh karena itu Hizbut tahrir memiliki cita-cita untuk membentuk sebuah masyarakat dan Negara yang Islami, dalam arti bahwa semua kegiatan kehidupan dalam negara itu diatur dengan hukum-hukum syariat dibawah naungan negara *Khilafah*.⁹

Pada era reformasi, yang sering disebut sebagai era keterbukaan dan kebebasan politik, telah tercipta sebuah kondisi yang mendukung bagi bangkitnya kembali politik Islam dan tumbuhnya gagasan-gagasan tentang formalisasi syariat Islam di Indonesia. Gerakan formalisasi syariat Islam yang marak pada era

⁹ .*Ibid*, halm. 176-178.

Reformasi ini, di samping diperjuangkan oleh partai-partai Islam, juga dikampanyekan secara besar-besaran oleh kelompok-kelompok “Islam garis keras” yang tergabung dalam beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam. NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia tidak termasuk organisasi yang mendukung gagasan tentang formalisasi syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. NU secara tegas menolak gagasan tersebut.¹⁰

Demak merupakan salah satu kabupaten yang hampir mayoritas penduduknya memeluk Agama Islam dan dulunya kabupaten ini dikenal dengan nama bintoro atau glagahwangi yang merupakan daerah kadipaten dibawah kekuasaan majapahit. Dengan berkembangnya Islam di Demak, maka Demak dapat berkembang sebagai kota dagang dan pusat penyebaran Islam dipulau Jawa. Hal ini dijadikan kesempatan bagi Demak untuk melepaskan diri dengan melakukan penyerangan terhadap majapahit. Setelah majapahit runtuh maka Demak berdiri sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa dengan rajanya yaitu Raden Fatah. Kerajaan Demak secara geografis terletak di Jawa Tengah dengan pusat pemerintahannya di daerah Bintoro dimuara sungai, yang dikelilingi oleh daerah rawa yang luas perairan laut muria.

Bintoro sebagai pusat kerajaan Demak terletak antara bergola dan jepara, dimana bergola adalah pelabuhan yang penting pada masa berlangsungnya kerajaan Mataram (Wangsa Syailendra), sedangkan jepara akhirnya berkembang sebagai pelabuhan yang penting bagi kerajaan Demak. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat Demak lebih berdasarkan pada agama dan budaya Islam

¹⁰ *Ibid*, halm. 235

karena pada dasarnya Demak adalah pusat penyebaran Islam dipulau Jawa. Sebagai pusat penyebaran Islam, Demak menjadi tempat berkumpulnya para wali seperti Sunan kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus dan Sunan Bonang. Para wali tersebut memiliki peranan yang penting pada masa perkembangan kerajaan Demak bahkan para wali tersebut menjadi penasihat bagi raja Demak. Para kyai dengan kelebihan pengetahuannya dalam islam, sering kali dilihat orang yang senantiasa dapat memahami keagungan Tuhan dan rahasia alam, hingga dengan demikian mereka dianggap memiliki kedudukan yang tidak terjangkau, terutama oleh kebanyakan orang awam. Dalam beberapa hal, mereka menunjukkan kekhususan mereka dalam bentuk berpakaian yang merupakan simbol kealiman yaitu kopiah dan surban. Seorang pendidik/kyai mempunyai kedudukan layaknya orang tua dalam sikap kelemah-lembutan dan kecintaannya terhadap berbagai kalangan. Dengan demikian kyai mampu menjalin hubungan yang erat dengan raja/bangsawan-para wali/Ulama dengan rakyat. Hubungan yang erat tersebut, tercipta melalui pembinaan masyarakat yang diselenggarakan di masjid maupun pondok pesantren. Dengan demikian, tercipta kebersamaan atau ukhuwah Islamiyah.¹¹

Berangkat dari sinilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *Persepsi Kyai Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Demak Tentang Hubungan Agama Dan Negara* menggunakan metode wawancara dengan kyai NU di Kabupaten Demak, karena hampir mayoritas Kyai di kabupaten Demak mengikuti faham NU. (*ahlus sunah wall jamaah*) sehingga dalam penelitian ini

¹¹ Sulistiono, *Mengenal masjid Agung Demak dan Penyebaran Islam di Jawa*, CV. Pelangi Publishing Semarang, 2009, hal 5-7.

mampu memberikan gambaran bagaimana antara ulama dan umarok mempunyai visi membangun kabupaten Demak pada khususnya dan Negara pada umumnya.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah:

Bagaimana persepsi Kyai NU Kabupaten Demak tentang hubungan Agama dan Negara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui persepsi Kyai NU Kabupaten Demak tentang hubungan Agama dan Negara menurut pandangan para kyai yang satu dan lainnya. Dan dapat diketahui bahwa hampir mayoritas Kyai dikabupaten Demak menganut faham NU (*ahlussunah wall jamaah*). Yang akhirnya dari penelitian ini memberikan konstribusi positif untuk memaknai sebuah konsep kenegaraan. Memberikan kontribusi pengetahuan bagi masyarakat bahwa kyai yang hanya terkenal sebagai seorang yang berpegang teguh terhadap ajaran agama, juga dapat bergaul dengan masyarakat. walaupun demikian peran kyai juga merupakan sebuah gambaran peran agama dalam sebuah kenegaraan, yang dimana peran agama adalah sebagai benteng masyarakat dalam menjaga kerukunan, dalam menjaga keutuhan Negara, dalam menjaga keamanan Negara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini yaitu:

1. Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan keilmuan di bidang studi ilmu politik.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

2. Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman masyarakat tentang hubungan agama dan Negara dalam menjalankan aktifitas kenegaraan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi *counter* bagi oknum-oknum pemeluk agama Islam radikal dalam menjalankan kenegaraan.

E. Kerangka Dasar Teori

Landasan teori yang digunakan oleh peneliti dalam menulis skripsi yang berjudul “*Persepsi kyai NU tentang hubungan Agama dan Negara studi kasus Kyai NU Kabupaten Demak*” ini adalah teori hubungan agama dan Negara, sedangkan Persepsi sendiri berasal dari bahasa Latin *perceptio*, *perciptio* adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan.¹²

¹² <https://id.wikipedia.org/wiki/Persepsi>, diakses pada tanggal 06 Mei 2018, pukul: 12:49 WIB.

1. Pengertian Kyai

Makna kyai sangat sering terdengar di masyarakat Indonesia, dan sering terdengar panggilan tersebut di pulau Jawa bahkan dalam istilah masyarakat Jawa Barat menggunakan istilah Ajengan. Biasanya istilah kyai juga disematkan kepada orang yang dituakan, bukan hanya dalam masalah agama, tetapi juga dalam masalah lainnya. Bahkan benda-benda tua peninggalan sejarah pun sering disebut dengan panggilan kyai. Melihat realita ini, sepertinya panggilan kyai memang tidak selalu mencerminkan tokoh agama, apalagi ulama. Sedangkan panggilan ustadz, biasanya disematkan kepada orang yang mengajar agama. Artinya ustad adalah guru agama, pada semua levelnya. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa bahkan kakek dan nenek. bahkan bisa saja pemuda yang baru keluar atau lulus dari sebuah ponpes dan mengajar anak-anak mengaji di panggil ustad, Namun hal itu lebih berlaku buat kita di Indonesia ini saja.¹³

Diantara istilah yang ada di negeri kita yang kebanyakan kita mengetahuinya adalah istilah Kyai. Terkadang dieja dengan Kiai. Terkadang juga disingkat dengan julukan Ki atau Yi. Meskipun termasuk istilah yang sangat populer, istilah Kyai ini masih mengandung banyak misteri. Ketika kita ditanya tentang apa itu Kyai, tak banyak dari kita yang bisa menyebutkan pengertian Kyai kecuali satu pengertian saja yang juga masyhur di kalangan kita yakni Kyai adalah sebutan lain untuk ulama atau orang yang memiliki ilmu agama secara mendalam yang juga diharapkan bisa menjadi panutan atau istilah lain Kyai adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) plus amal dan akhlak yang sesuai dengan

¹³ <http://archieslow.wordpress.com/2011/11/08/definisi-ulama-ustad-dan-kyai/> diakses pada tgl 31 Maret 2013, Pukul 09:00 WIB.

ilmunya. Menurut Saiful Akhyar Lubis, menyatakan bahwa “Kyai adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren, maju mundurnya pondok pesantren ditentukan oleh wibawa dan kharisma sang kyai. Karena itu, tidak jarang terjadi, apabila sang kyai di salah satu pondok pesantren wafat, maka pamor pondok pesantren tersebut merosot karena kyai yang menggantikannya tidak sepopuler kyai yang telah wafat itu. Itulah pengertian yang lumrah di masyarakat kita secara kebanyakannya. Menurut Nurhayati Djamas mengatakan bahwa “kyai adalah sebutan untuk tokoh ulama atau tokoh yang memimpin pondok pesantren”. Sebutan kyai sangat populer digunakan di kalangan komunitas santri. Kyai merupakan elemen sentral dalam kehidupan pesantren, tidak saja karena kyai yang menjadi penyangga utama kelangsungan sistem pendidikan di pesantren, tetapi juga karena sosok kyai merupakan cerminan dari nilai yang hidup di lingkungan komunitas santri. Kedudukan dan pengaruh kyai terletak pada keutamaan yang dimiliki pribadi kyai, yaitu penguasaan dan kedalaman ilmu agama, kesalehan yang tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari yang sekaligus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan menjadi ciri dari pesantren seperti ikhlas, tawadhu`, dan orientasi kepada kehidupan ukhrowi untuk mencapai riyadhah. Kyai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren. Ia seringkali bahkan merupakan pendirinya. Sudah sewajarnya bahwa pertumbuhan suatu pesantren semata-mata tergantung kemampuan kepribadian kyainya.¹⁴

Dari pengertian ini, Kyai sama pengertiannya dengan Buya bagi masyarakat Sumatera Barat dan sekitarnya; Ajengan bagi masyarakat Jawa Barat (Sunda);

¹⁴ http://eprints.walisongo.ac.id/1230/3/074411006_Bab2.pdf, diakses pada tanggal 31 Juli 2019

Teungku bagi masyarakat Aceh; Tofanrita bagi masyarakat Sulawesi Selatan; Tuan Guru bagi masyarakat Lombok dan Nusa Tenggara, dan lain sebagainya. Semua istilah itu sama secara pengertian, namun berbeda dari segi penamaan. Itu adalah salah satu pengertian yang sudah lumrah di masyarakat kita. Namun pengertian itu bukanlah satu-satunya pengertian dari istilah Kyai ini. Istilah Kyai juga dikenal masyarakat sebagai tokoh yang memimpin sebuah pondok pesantren. Di masyarakat Jawa, ada sebuah dogma yang membedakan antara kedudukan ustadz dengan Kyai. Dalam bahasa Arab, ustadz maknanya adalah guru yang kemudian dipersempit pengertiannya oleh masyarakat Indonesia sehingga sebutan ustadz hanya disematkan kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu agama dalam masyarakat, atau orang-orang yang religius. Adapun Kyai, di masyarakat Jawa, kedudukannya lebih tinggi dari pada kedudukan ustadz. Ada begitu banyak ustadz yang mengajarkan ilmu agama, akan tetapi kebanyakan mereka tidak memiliki pondok pesantren. Di masyarakat Jawa, kyai sebagai sosok pemilik dan pemimpin sebuah pondok pesantren akan merekrut para ustadz sebagai dewan pengajar para santri. Biasanya, para ustadz itu direkrut dari para santrinya yang sudah dianggap mumpuni dalam memberikan pengajaran kepada santri-santri tingkat bawah. Dan tidak jarang kita temukan dalam sebuah pondok pesantren terdapat lebih dari seorang kyai, seperti pesantren-pesantren yang berada di Kabupaten Jombang – Jawa Timur dan di daerah lainnya.¹⁵

¹⁵ <http://granadaprivat.wordpress.com/tag/kyai/>, di akses tanggal 24 April 2013, pukul 23:30 WIB.

2. Sejarah Berdirinya NU

Nahdlatul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi Islam terbesar dengan jumlah anggota terbanyak di Indonesia, dan merupakan suatu organisasi yang berbasis massa di bawah kepemimpinan ulama. Keyakinan yang mendalam terhadap berbagai pemikiran, gagasan, konsep di segala hal, serta metode-metode yang diusung NU diyakini sebagai kunci utama NU untuk dapat eksis dan terus bertahan hingga hari ini. Untuk memahami NU sebagai jam'iyah diniyah (organisasi keagamaan) secara tepat, belumlah cukup dengan melihat dari sudut formal sejak ia lahir. Sebab jauh sebelum NU lahir dalam bentuk jam'iyah (organisasi), ia terlebih dahulu ada dan berwujud jama'ah (community) yang terikat kuat oleh aktivitas sosial keagamaan yang mempunyai karakteristik tersendiri. Lahirnya jam'iyah NU tidak ubahnya seperti mewadahi suatu barang yang sudah ada. Dengan kata lain, wujud NU sebagai organisasi keagamaan itu, hanyalah sekedar penegasan formal dari mekanisme informal para ulama sepaham, pemegang teguh salah satu dari empat mazhab: Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali yang sudah berjalan dan sudah ada jauh sebelum lahirnya jam'iyah NU. Tujuan didirikannya NU adalah memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam Ahlusunnah wal jamaah yang menganut salah satu dari mazhab empat, dan mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya serta melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat serta martabat manusia. Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka NU melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Di bidang agama mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah Wal Jamaah dan menurut salah satu mazhab empat dalam masyarakat dengan melaksanakan dakwah Islamiyah dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar.
2. Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang taqwa dan berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.
3. Di bidang sosial, mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk pemerataan kesempatan berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan, dengan pengutamakan tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan 4. Mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya *Khaira Ummah*.¹⁶

Pada dasarnya ada dua pilar utama yang menjadi eksistensi dan perjuangan Jam'iyah NU: Pesantren sebagai pusat piwulangnyanya dan masjid-surau sebagai sentra-sentra keumatannya. Melalui dua pilar inilah NU dengan segala pasang bisa bertahan sebagai ormas dengan potensi keumatan terbesar sampai sekarang. Namun diakui bahwa dalam tiga dasawarsa terakhir, NU lebih mengedepankan pesantren dan kurang memperhatikan masjid-masjid.¹⁷

¹⁶ <http://repository.uinsu.ac.id/164/3/BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 31 Juli 2019, Pukul: 20:22 WIB

¹⁷ Masdar Farid Mas'udi, *Membangun NU Berbasis Masjid dan Umat* (Jakarta: LTMI-NU, 2007), Hal. 6-7.

Sejarah perkembangan NU secara luas bisa dibagi dalam tiga fase: periode *awal* sebagai organisasi sosial keagamaan, periode *kedua* ketika ia berfungsi selain sebagai organisasi sosial keagamaan, juga berfungsi sebagai partai politik atau menjadi unsur formal dari sebuah partai, dan terakhir kembali ke aktivitas-aktivitas sosial keagamaan. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa NU didirikan sebagai jam'iyah diniyah atau organisasi keagamaan, konstitusi awalnya menyatakan bahwa organisasi akan berkhidmat pada kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan dan ekonomi, diantaranya meningkatkan komunikasi antar ulama, memperbaiki mutu sekolah-sekolah Islam, menyeleksi kitab-kitab yang dipelajari di pesantren dan mendirikan badan-badan untuk membantu kegiatan pertanian dan perdagangan umat Islam. Untuk itu kehadiran NU memiliki peranan yang penting untuk Indonesia di antaranya melakukan perubahan-perubahan dalam sikap dan pandangan dunia banyak kalangan Muslim, khususnya dalam beradaptasi dengan tantangan-tantangan modernisasi. Peranan ini terkadang disalah pahami oleh para pengamat. Mereka melihat NU sebagai penghubung, antara negara modern dan masyarakat tradisional. Clifford Geertz, misalnya menempatkan kiai NU sebagai "makelar budaya". Tetapi penggunaan istilah ini, juga dengan pemahaman suatu proses di mana "makelar budaya" melakukan seleksi mana budaya yang bisa diterima dan mana yang harus ditolak mengimplikasikan seolah "para makelar budaya" itu sendiri tidak memiliki pandangan dan pendekatan-pendekatan yang orisinal. Pandangan tentang peranan kiai pesantren ini, yang tercatat sebagai salah satu elemen terpenting dalam kepemimpinan NU, telah dibantah oleh hasil penelitian Hiroko Horikoshi. Hasil

studinya mengenai fungsi sosial kiai di Jawa Barat menunjukkan bahwa daya dorong perubahan itu datang dari dalam inti pemikiran agama, yang mengiring interaksi yang panjang dengan modernisasi itu sendiri.¹⁸

Organisasi Nahdlatul Ulama berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Suatu waktu Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni mazhab Wahabi di Mekkah, kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermazhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut. Dengan sikapnya yang berbeda itu kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres Al Islam di Yogyakarta pada tahun 1925. Akibatnya kalangan pesantren juga tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Mu'tamar 'Alam Islami (Kongres Islam Internasional) di Mekkah yang akan mengesahkan keputusan tersebut. Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermazhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamakan Komite Hejaz, yang diketuai oleh K.H. Wahab Hasbullah.

Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hejaz, dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, maka Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya, hingga saat ini di Mekkah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan mazhab mereka masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama, yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermazhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah dan peradaban yang

¹⁸ Greg Barton dan Greg Fealy, *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara* (Yogyakarta: LKiS, 1997), Hal. 4.

sangat berharga. Maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai kyai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926).

Organisasi ini dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka K.H. Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam khittah NU, yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.¹⁹ NU menerapkan ahlussunnah wal jama'ah sebagai pemahaman keagamaan (*manhaj al-fikr*) dengan metode yang komprehensif, yakni dengan memadukan antara wahyu dan akal yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Dengan metode ini NU merumuskan tiga prinsip utama dalam paham ahlussunnah wal jama'ah yang dianut oleh NU, yaitu moderenisasi (*tasawuth*), menjaga keseimbangan (*tawazun*), dan toleransi (*tasamuh*).

Metode pemahaman dan pemikiran keagamaan ini lahir dari proses dialektika sejarah pemikiran dan gerakan NU yang intens. Dengan mendasarkan pada tuntutan wahyu dan tuntutan akal secara profesional yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan dan hukum kehidupan (*sunnatullah*), maka NU sejauh

¹⁹ <http://serbasejarah.blogspot.com/2011/09/antara-NU-dan-Muhammadiyah.html>, di akses pada tanggal 14 Juli 2013, pukul 02:35 WIB.

mungkin menghindari pertentangan politik dan fanatisme kelompok yang masuk dalam pemahaman keagamaan. Dengan prinsip itulah, NU bisa diterima dan berkembang di semua lapisan masyarakat. Disamping itu, NU juga mampu untuk mengaktualisasikan dirinya dan ikut berperan dalam mewujudkan kehidupan yang penuh kedamaian dalam wahana kebangsaan dan kenegaraan bersama peradaban, kebudayaan dan tradisi lainnya di Indonesia.²⁰

Tidak sama halnya warga NU Kabupaten Demak dianjurkan Dalam memaknai dan memahami ayat-ayat suci dan teks di dalam Alquran maupun hadis, warga Nahdatul Ulama (NU) diminta tak boleh berpikiran sempit dalam menyikapi seperti yang selama ini digembar gemborkan kelompok Islam garis keras. Agama Islam juga harus mengembangkan yang meliputi ilmu pengetahuan, pendidikan, akhlaq, sosial sehingga menjadi umat yang berkemanusiaan rahmatan lil alamin. Demikian disampaikan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj saat memberikan tausiyah pada acara Pembinaan warga NU dan pelantikan Bersama Majelis Wakil Cabang (MWC) dan Badan Otonom (Banom) NU di Masjid Baitul Makmur Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

Kalau ada teman-teman yang selalu bilang kepada kita, harus kembali pada Al-Qur'an dan hadits, mbok ya dijelaskan ayat yang mana dan hadits rowi siapa," papar Kang Said -panggilan akrab ketua umum PBNU tersebut. Demak yang selama ini menjadi basis NU tidak perlu diragukan lagi dalam hal syari'ah dan aqidah dikarenakan tradisi pesantren dan ulama yang ada dipedesaan masih aktif dalam mengawal tradisi ahlussunnah wal jamaah tersebut, justru yang perlu

²⁰ *Ibid, hal. 103*

dikembangkan program NU yang dibutuhkan umat. Masyarakat Demak, kalau hanya Aqidah dan Syari'ah sudah beres, madrasah diniyyah, musholla dan masjid masih kita dengar dan kita lihat proses belajar mengajar mengaji.²¹

3. Hubungan Agama dan Negara

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat (agency) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan mentertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri. Dengan demikian negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama. Dalam rangka ini boleh dikatakan bahwa negara mempunyai dua tugas :

- a. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonis yang membahayakan.

²¹ <http://emka.web.id/ke-nu-an/2011/said-aqil-siradj-agama-tidak-hanya-mengurusi-aqidah-dan-syariah/>, di akses tgl 28 agustus 2013, pukul 01:15 WIB.

- b. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan-kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahakan kepada tujuan nasional.

Hubungan Islam dengan Negara modern secara teori dapat di bedakan menjadi tiga pandangan; integralistik, simbiotik, sekularistik.

1. Paradigma integralistik

paradigma ini menganut paham bahwa antara agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan. Menurut paham ini alqur'an mengandung segala-galanya termasuk di dalamnya mengenai sistem ketatanegaraan dan pemerintahan. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan negara, menurut paham ini, umat islam hendaknya kembali pada sistem ketatanegaraan islam, dan tidak perlu mengadopsi sistem lain. Secara konseptual agama tidak dapat terpisahkan dari politik, dan semua upaya pemikiran seorang muslim tentang moral dan politik mempunyai dasar-dasar keagamaan. menurut paradigma ini negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Hukum yang di gunakan pada paradigma ini adalah hukum Islam Paradigma Integralistik ini, di anut oleh Negara Saudi Arabia dan kelompok Islam Syi'ah di Iran.

2. Paradigma Simbiotik

Paradigma ini menganut paham bahwa antara Negara dan Agama itu sesuatu yang berbeda namun memiliki hubungan timbal balik di mana peran

Agama terhadap Negara adalah sebagai pembina moral, etika, dan sumber spiritulitas warga Negara. Dan peran Negara terhadap Agama adalah sebagai pelestarian dan pengembangan itu sendiri. Karena tanpa Negara, agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan kenegaraan pada paradigma ini di atur oleh kontrak sosial, namun bisa di warnai oleh hukum Agama. Kelompok ini menyadari bahwa Islam mempunyai ajaran etika bernegara dengan prinsi-prinsipnya antara lain seperti fridom kebebasan dan kemerdekaan dalam hal ini agama di harapkan lebih mementingkan etika sosial dan wawasan moralitas dari pada mementingkan legal formalism agama. Agama juga akan lebih mengedepankan nilai dasar universal agar terjalin ke harmonisan di antara sesama warga negara. Contoh negara yang menganut paradigma ini adalah mesir dan indonesia.

3. Paradigama Sekularistik

Paham ini beranggapan bahwa antara Agama dan Negara adalah sesuatu yang berbeda dan keduanya memiliki peran dan fungsi masing-masing, sehingga keduanya terdapat pemisahan yang sangat jelas. Paradigma ini menyatakan bahwa Agama tidak menekankan adanya kewajiban mendirikan Negara. Kelompok ini mengetengahkan argumentasinya, bahwa tidak ada yang secara tegas mewajibkan pembentukan pemerintahan dan negara, kelompok ini juga menegaskan, bahwa pembentukan pemerintahan tidaklah masuk dalam tugas yang di wahyukan Tuhan kepada nabi Muhammad. Menurut paham ini Negara adalah urusan publik, sedangkan agama merupakan urusan pribadi warga negara. Hukum yang berlaku dalam

paradigma ini adalah *sosial contract* yang sama sekali tidak melibatkan hukum agama, contoh negara yang menganut paradigma ini adalah negara turki.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis, Lokasi, dan Pendekatan

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut dengan *research* jika dilihat dari susunan katanya, terdiri atas dua suku kata, yaitu *re* yang berarti melakukan kembali atau pengulangan dan *search* dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan lebih komprehensif.

Menurut Denzin & Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Erickson (1968) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.²³

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*field research*) yang datanya di peroleh dari lapangan dengan cara wawancara.²⁴ Lokasi penelitiannya di Kabupaten Demak. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah

²²<http://jasapenulisanmakalah.blogspot.com/2018/06/hubungan-antara-agama-dan-negara.html>, diakses pada tanggal 31 Juli 2019, Pukul: 20:55 WIB

²³ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), Hal. 7.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Edisi Revisi V*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, cet. XII, Hal. 10.

fenomenologis. Pendekatan fenomenologi adalah upaya mencari berbagai perspektif, serta apa-apa yang dapat dipahami dari realitas yang terkandung dalam ajaran agama yang esensial.²⁵ Fenomenologis juga dimaksudkan untuk memberikan suatu pandangan menyeluruh dari ide-ide dan motif-motif yang kepentingannya sangat menentukan persepsi. Pendekatan fenomenologis ini penulis gunakan untuk melihat fenomena-fenomena yang tampak dari keberagaman ulama-ulama NU Kabupaten Demak dalam memandang hubungan Agama dan Negara.

2. Sumber Data

Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah pandangan persepsi ulama NU Kabupaten Demak tentang hubungan Agama dan Negara yang diperoleh melalui *interview*. *Interview* berisi pertanyaan yang berhubungan dengan Agama dan Negara, bagaimana sebenarnya yang dimaksud pemerintahan Islam menurut NU, dll. Sedangkan data sekundernya merujuk pada sumber-sumber pendukung teori tentang Nasionalisme NU, profil NU Kabupaten Demak, pandangan politik dan keagamaan NU, dll., yang diperoleh dari sumber literatur/tertulis seperti buku, majalah, koran, maupun dokumen.

²⁵ Peter Conolly, *Pendekatan Studi Agama*, Terj. Imam Khoiri, Yogyakarta: LKiS, 2002, cet. I, hlm. 153.

3. Metode Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data, penulis menggunakan tiga metode, yaitu:

a. *Interview* (Wawancara)

Metode wawancara adalah tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.²⁶ Wawancara penulis lakukan dengan para kyai di Kabupaten Demak yang dijadikan sampel yang terdiri atas pengurus Syuriah, Tanfidziyah, dan Mustasyar, juga dengan Kyai NU non struktural khususnya para pengasuh Pondok Pesantren salaf khas NU.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui bahan tertulis, artifack, film, dll. yang mengandung keterangan dan penjelasan tentang suatu peristiwa atau pemikiran.²⁷ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang profil NU di Kabupaten Demak.

c. Metode Observasi

Metode ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Dengan tujuan mendapatkan gambaran yang benar tentang suatu gejala sosial atau peristiwa tertentu yang ada dan terjadi pada suatu lokasi dalam suatu daerah.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 135.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001, hlm. 61.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya akan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu penyajian data guna menjelaskan suatu pemikiran atau fakta apa adanya.²⁸ Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan pandangan Kyai NU Kabupaten Demak tentang hubungan Agama dan Negara yang penulis uraikan dalam bentuk narasi. Selanjutnya akan diperhatikan sisi-sisi data yang harus atau memang memerlukan analisis lebih lanjut.²⁹

Sedangkan kualitatif penulis lakukan dengan pertimbangan; *pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. *Kedua*, metode ini mendekatkan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan. *Ketiga*, kualitatif lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.³⁰ Oleh karena itu, pola kualitatif ini lebih tepat untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian, sebab data yang penulis gali adalah melalui wawancara.

Adapun teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu pembahasan yang bertujuan untuk membuat gambaran terhadap data-data tersebut. Dengan menggunakan teknik penelitian ini berharap dapat memberikan gambaran yang sistematis, faktual, aktual, dan akurat mengenai

²⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 18. Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002, hlm. 68-69.

²¹ Lexy J. Muleong, *Loc. Cit.*, hlm. 5.

fakta-fakta yang ada di masyarakat.³¹ Analisis data dibagi menjadi dua yaitu analisis data statistik non-statistik, mengingat data ini tidak berupa hasil tapi proses maka analisis yang digunakan adalah analisis data non statistik yang disebut juga sebagai analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan model matematik, model statistik, atau model tertentu lainnya.

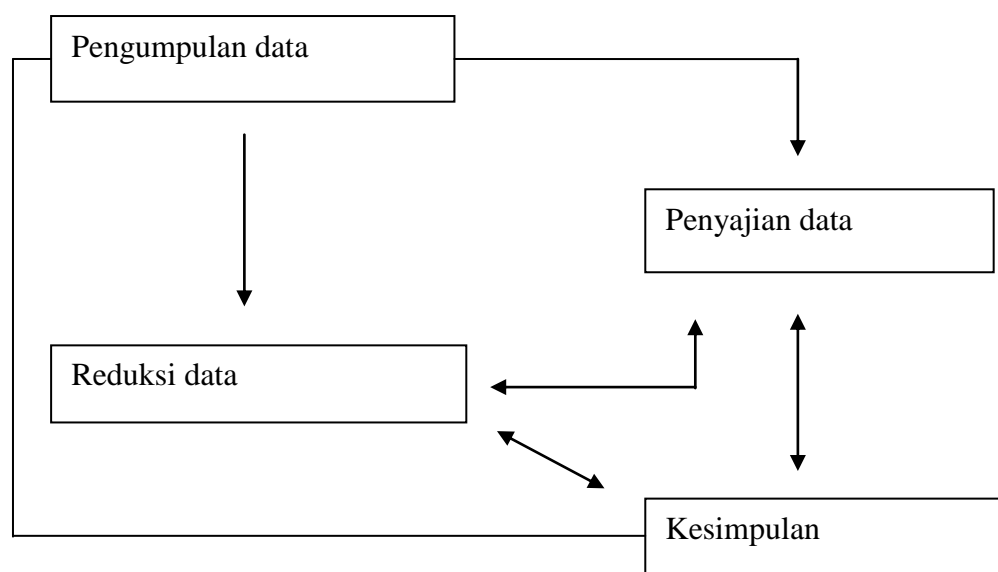
Adapun langkah-langkah yang dipergunakan dalam analisis data kualitatif setelah data-data terkumpul dari berbagai sumber, yaitu :

- a. Pengumpulan data, pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari data dan mengumpulkan berbagai jenis data atau sumber dari lapangan yang mendukung penelitian ini.
- b. Reduksi data, reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.
- c. Penyusunan/penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

³¹ Zidni Muhammad Ferdiansyah, *Skripsi “Perilaku Pemilih (Dinamika Pilihan Rasional Dalam Kemenangan Jokowi-Basuki Pada Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta)”*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014, h. 10.

Kesimpulan, yaitu suatu tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau sebagai makna yang muncul yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan validitasnya.³²

Gambar Bagan 1.1 Bentuk skema analisis data



³² Jumandhoni Hari, *Skripsi "Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus dalam Partai Perindo"*, Semarang: Universitas Wahid Hasyim, 2016, h. 31.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun rincian sebagai berikut, dengan tujuan agar sistematis dan mudah untuk dipahami:

Bab I Pendahuluan, Bab ini memuat latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Gambaran Umum Kabupaten Demak dan Nasionalisme Kyai, Pada bab ini penulis membahas sekilas tentang Keadaan Geografis, Keadaan Demografis, dan Gambaran umum kabupaten Demak, pondok pesantren yang ada di Demak, dan sejarah perjuangan tokoh NU dalam membela Negara.

Bab III Analisis Persepsi Kyai NU tentang Hubungan Agama dan Negara, Pada bab ini merupakan bagian paling penting dari penulisan skripsi, karena berisikan tentang permasalahan yang penulis angkat yaitu tentang Persepsi Kyai NU tentang Hubungan Agama dan Negara, Penulis akan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang ada dan kemudian akan di analisa.

BAB IV Penutup, Pada bab ini penulis berupaya untuk menyimpulkan pembahasan mengenai skripsi ini sekaligus menjadi penutup pada pokok permasalahan. Dan selanjutnya saran yang berkaitan dengan masalah yang diajukan dari keseluruhan skripsi ini bagi para pembaca.

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN DEMAK

A. Kabupaten Demak

Kabupaten Demak merupakan salah satu Kabupaten pesisir di Indonesia. Berdasarkan kondisi eksisting, kabupaten Demak sering dilanda banjir rob. Daerah yang beresiko terhadap banjir rob yaitu wilayah pesisir Kabupaten Demak yang meliputi beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Sayung, Kecamatan Bonang, dan sebagian Kecamatan Karang Tengah. Penyebab munculnya air rob ini yaitu adanya penurunan atau amblesnya tanah yang mengakibatkan air melimpas ke daratan. Amblesan tanah merupakan bencana yang berlangsung lambat dan hingga sekarang masih terjadi di daerah pesisir Kabupaten Demak sejak tahun 1980-an. Proses amblesan tanah ini terjadi secara bertahap, meliputi daerah yang luas dan belum sepenuhnya disadari masyarakat meskipun dampak-dampaknya sudah terlihat jelas seperti banjir rob, kerusakan pada bangunan, jalan, jembatan, daerah industri dan kehilangan tempat tinggal. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menunjukkan kurangnya pengetahuan mengenai proses dan mekanisme amblesan tanah. Hasil penelitian Tobing, dkk (2001)

Amblesan lahan di sebagian Kota Semarang mencapai 15 cm per tahun terjadi di Tanjung Mas ke arah timur hingga pantai di wilayah Kecamatan Genuk dan sebagian Kecamatan Sayung yang masuk wilayah Kabupaten Demak, kemudian disusul daerah Bandarharjo dan sekitarnya sebesar 10 – 15 cm per tahun, Tanah Mas, Stasiun Tawang, Karang Tengah, Marina dan Tawang Mas 5 – 10 cm per tahun. Di daerah Selatan dan Tenggara seperti Bangetayu dan

sekitarnya amblesan umumnya dibawah 5 cm per tahun. Amblesan di sebagian kota Semarang umumnya terjadi pada dataran alluvial dengan kedalaman yang berbeda, semakin ke Utara umumnya amblesan semakin besar. Holtz (1985) menjelaskan penyebab amblesan tanah diduga akibat pemampatan endapan alluvial secara alami, pembebanan bangunan, pengurangan tanah dan ekstraksi air tanah melebihi kemampuannya (Safe Yield). Amblesan tanah di sebagian Kabupaten Demak ini menjadi masalah yang penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk bisa ditemukan solusi dan penanganannya.⁵³

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kabupaten /kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan peran serta masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan prasyarat bagi pemerintahan yang baik. Dalam rangka pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang akuntabel maka diterbitkanlah Tap MPR RI No. XI/MPR 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, serta Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

⁵³ <http://repository.unissula.ac.id/10325/6/BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 31 Juli 2019, Pukul: 21:13 WIB.

Oleh sebab itu Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan Perencanaan Strategis yang dirumuskan sebelumnya dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden melalui Menteri PAN dan salinannya kepada Mendagri dan Kepala Bappenas dengan menggunakan pedoman penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja (Perpres Nomor 29 tahun 2014). Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang.⁵⁴

Kabupaten Demak yang memiliki luas 89.743 Ha dan terbagi dalam 14 kecamatan yang terdiri dari 243 desa dan 6 kelurahan. 512 dusun, 6.326 Rukun Tetangga (RT) dan 1.262 Rukun Warga (RW). Wilayah Kabupaten Demak memiliki luas 89.743 Ha. Adapun batas administrasinya meliputi: Sebelah Utara Kabupaten Jepara dan Laut Jawa Sebelah Timur: Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan Sebelah Selatan: Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang Sebelah Barat: Kota Semarang. Dibawah ini adalah peta administrasi Kabupaten Demak dan pembagian luas wilayah menurut per kecamatan. Jumlah penduduk Kabupaten Demak pada tahun 2007 sebanyak 1.073.187 jiwa yang terdiri dari 531.606 jiwa penduduk laki-laki dan 541.581 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk tersebut tersebar ke-14 kecamatan dengan jumlah

⁵⁴ <https://demakkab.go.id/wp-content/uploads/2016/10/BAB-I.pdf>, diakses pada tanggal 31 Juli 2019, Pukul: 21:45 WIB

penduduk terendah di Kecamatan Kebonagung sebesar 38.940 jiwa dan paling banyak terdapat di Kecamatan Mranggen sebanyak 141.774 jiwa. Dari data kependudukan jumlah dan kepadatan di Kabupaten Demak pada tahun 2007 memiliki kepadatan bruto sebesar 12 jiwa/ha dan kepadatan netto nya 1121 jiwa/ha.⁵⁵

Dilihat dari usia produktif (15-49) masyarakat Demak berjumlah 516.120 orang. Sementara penduduk yang bekerja di berbagai bidang berjumlah 453.912 orang. Dengan demikian usia produktif yang tidak bekerja adalah 53.669 orang. Sementara yang bekerja tersebut mayoritas sebagai petani mencapai 207.234 orang (45 persen), keuangan dan jasa 43.876 orang (7.6 persen), sisanya dibidang konstruksi (2,2 persen), angkutan dan komunikasi (4,7 persen).

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat bahwa angkatan pencari kerja ada 9.051 orang dengan kualifikasi pendidikan terbanyak SLTA dan sederajat berjumlah 4.407 orang (48,69 persen) disusul sarjana/ diploma (36,32 persen), selebihnya adalah SLTP dan sederajat (12,33 persen) serta lulusan SD (2,66 persen).

Sektor agama Kabupaten Demak mayoritas beragama Islam yang mencapai 99,16 persen, selebihnya beragama Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak mencatat ada 4.031 tempat peribadatan terdiri atas 664 masjid, 3.345 mushola, 1 gereja katolik dan 21 gereja Kristen Protestan. Jumlah jamaah haji pada tahun 2004 tercatat 931 jamaah. Angka ini menurun 26% jika dibandingkan tahun 2002 yang mencapai 1.176 jamaah.

²¹<http://kelompokujuhbetokan.wordpress.com/about/bab-3-gambaran-umum/gambaran-umum-kabupaten-Demak>, di akses pada tanggal 4 Desember 2013, pukul 01:29 WIB.

Pendidikan agama terutama melalui pondok pesantren tercatat jumlah santri sebanyak 28.898 santri dengan pengajar 1.949 ustadz yang tersebar di 158 pondok pesantren di 14 Kecamatan. Penyebaran santri terbanyak dikecamatan Bonang sebanyak 4.986 santri (17%), Mranggen 4.860 (16,9%) dan Wonosalam 3.178 (11%). Dalam catatan Kementerian Agama Kabupaten Demak terdapat sekurang-kurangnya 3-6 pesantren disetiap kecamatan. Dengan Demikian kabupaten Demak dapat dikatakan sebagai daerah dengan masyarakat yang memiliki kesadaran religius tinggi. Di samping pengaruh alim ulama di Kabupaten Demak dengan 1.514 orang, mubaligh 636 orang dan khotib 2.732 orang.⁵⁶

B. Pondok Pesantren yang ada di Demak

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan islam non formal yang tersebar di Indonesia. Dimana pondok pesantren lahir ditengah-tengah masyarakat. Setiap pondok pesantren memiliki ciri khas yang berbeda-beda tergantung dari bagaimana tipe *leadershipnya* dan metode seperti apa yang diterapkan dalam pembelajarannya. Seiring dengan perkembangan zaman, tidak sedikit pesantren yang mencoba menyesuaikan dan bersedia menerima akan suatu perubahan, namun tidak sedikit pula pesantren yang memiliki sikap penutup diri dari segala perubahan-perubahan dan pengaruh perkembangan zaman dan cenderung mempertahankan apa yang menjadi keyakinan. Untuk itu disini akan mencoba menelaah seperti apa ciri-ciri pesantren yang bersikap dinamis dan dilihat dari segi apa saja pesantren tersebut dikatakan sebagai pesantren yang

⁵⁶ Adip Kholidul, *Semangat Membangun Demokrasi Jejak Politik Kiai Dalam Pilkada Langsung Kabupaten Demak Tahun 2006*, Demak: Gelora Press, 2007, hal. 45-47

bersikap dinamis, agar kita dapat melihat dan menyimpulkan sendiri apakah pesantren yang dimaksud bersikap dinamis ataukah statis.⁵⁷

Indonesia sebagai salah satu negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, ternyata memiliki sebuah sistem pendidikan yang khas dan unik bernama pesantren. Dikatakan khas karena pendidikan model pesantren hanya berkembang pesat di Indonesia. Sementara di negara lain akan sulit model pendidikan seperti ini. Selain khas dan unik, pesantren juga merupakan pendidikan Islam asli produk Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pesantren adalah “bapak” pendidikan Islam di Indonesia.⁵⁸ Oleh karena khas dan unik itulah maka sudah banyak ragam perpektif yang mengkaji pesantren. Mulai dari yang bersifat general sampai spesifik. Diantaranya, tentang sejarah, materi, dan lain sebagainya.

Sejak zaman penjajahan, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, eksistensinya telah mendapat pengakuan masyarakat, ikut terlibat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak hanya dari segi moril, namun telah pula ikut serta memberikan sumbangsih yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebagai pusat pengajaran ilmu-ilmu agama Islam (tafaqquh fiddin) telah banyak melahirkan ulama, tokoh masyarakat, muballigh, guru agama yang sangat dibutuhkan masyarakat. Hingga kini pondok pesantren tetap konsisten melaksanakan fungsinya dengan baik, bahkan sebagian telah mengembangkan fungsinya dan perannya sebagai pusat pengembangan masyarakat.

⁵⁷ <http://keajaibanikhlas.blogspot.com/2013/02/makalah-tentang-ponok-pesantren.html>, diakses pada tanggal 31 Juli 2019, Pukul: 21:50 WIB

⁵⁸ <http://cunseondeok.blogspot.com/2015/11/pondok-pesantren.html>, diakses pada tanggal 31 Juli 2019, Pukul: 22:01 WIB.

Secara fisik, sebuah pesantren biasanya terdiri dari unsur-unsur berikut: di pusatnya ada sebuah masjid atau langgar; surau yang dikelilingi bangunan tempat tinggal kyai (dengan serambi tamu, ruang depan, kamar tamu), asrama untuk pelajar (santri) serta ruangan-ruangan belajar.

Kabupaten Demak sebagai daerah yang memiliki kesejarahan kota wali dengan didukung oleh mayoritas penduduk yang mayoritas muslim dan sebagai daerah basis pesantren dengan masyarakat yang mayoritas petani dan nelayan. Itu terbukti dengan banyaknya pesantren yang berdiri di kabupaten Demak. Kalau di lihat dari data kemenag kabupaten Demak Tahun 2013, jumlah pondok pesantren yang ada di demak kurang lebih 312 pondok. Tentu masih ada pondok-pondok kecil yang tidak terdata oleh kemenag. Dari gambaran tersebut menunjukkan bahwa masyarakat secara umum di kabupaten Demak merupakan pemeluk agama Islam. Berikut paparan data pondok pesantren yang ada di kabupaten Demak *terlampir*.

C. Nasionalisme Kyai

Nasionalisme di Indonesia sebenarnya sudah tumbuh sejak Indonesia dijajah. Merasa senasib dalam menghadapi berbagai persoalan, menjadikan berbagai suku di Indonesia melakukan sebuah komunikasi, sehingga melahirkan sebuah pergerakan nasional. Proses pergerakan nasional ini melahirkan simbol-simbol kebangsaan berupa bahasa kebangsaan, bendera kebangsaan, lagu kebangsaan dan nama sebuah bangsa. Keinginan merdeka ini tercermin dalam bangkitnya pergerakan nasional yang dimulai dengan Budi Utomo. Nasionalisme

di negara-negara berkembang bermanifestasi dalam bentuk sebuah pergerakan yang bertujuan untuk mengakhiri penjajahan dan mendirikan sebuah negara kebangsaan atau *nation state*. Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara, dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan. Nasionalisme adalah konsep modern yang muncul pada abad ke-17, bersama dengan lahirnya konsep negara-bangsa. Di Barat (Eropa), nasionalisme muncul sebagai wujud perlawanan terhadap feodalisme (kekuasaan absolut yang dimiliki pemuka agama dan bangsa). Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno yang dikutip oleh Yatim mengatakan nasionalisme terdiri dari rasa ingin bersatu, persatuan perangai dan nasib serta persatuan antara orang dan tempat. Perasaan sangat mendalam akan suatu ikatan yang erat dengan tanah tumpah darahnya, dengan tradisitradisi setempat dan penguasa-penguasa resmi di daerahnya selalu ada di sepanjang sejarah dengan kekuatan yang berbeda-beda. Kisah bertemakan kepahlawanan tentang perjuangan Indonesia telah banyak diproduksi dan diangkat ke layar lebar. Namun kebanyakan dari film-film tersebut hanya berkisah tentang perjuangan para pahlawan secara umum. Tidak banyak film yang mengangkat kisah perjuangan kemerdekaan dari kaum tertentu misalnya kaum agamis³. Padahal Indonesia merupakan negara dengan dasar Negara Pancasila yang sila pertamanya berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Ini berarti masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang agamis. Namun sayangnya perjuangan kemerdekaan bumi pertiwi ini lewat peranan kaum agamis yang

kurang terangkat, padahal kaum ini memiliki andil yang sangat besar. Banyak dari tokoh agamis yang menjadi pahlawan nasional karena telah berjuang dan mengorbankan segalanya demi melihat Indonesia sejahtera dan merdeka. Tak banyak film yang mengangkat kisah perjuangan pahlawan Indonesia dari kaum agamis. Salah satu film yang mengangkat kisah perjuangan para pahlawan dari kaum agamis adalah film Sang Kyai (2013). Film ini mengisahkan tentang bagaimana pengorbanan dan pertahanan kaum agamis dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Film ini merupakan biografi perjuangan pahlawan nasional yang berasal dari pemuka agama Islam yaitu KH. Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Film Sang Kyai yang ditulis oleh Anggoro Saronto, disutradarai oleh Rako Prijanto dan diproduksi oleh Rapi Films. Film ini resmi keluar pada tanggal 30 Mei 2013. Film ini mengapresiasi rasa nasionalisme ini menceritakan tentang perjuangan K.H. Hasyim Asy'ari saat melawan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan NKRI. Dalam proses memerdekakan Indonesia bukan hanya para pejuang umum saja yang memerdekakan Indonesia, tetapi disini juga hadir para pejuang dan pahlawan kaum agamis, yang difokuskan melalui jalur diplomasi yang dipelopori oleh para ulama NU dan santri-santri (kaum sarungan) yang dipimpin oleh KH Hasyim Asy'ari. KH Hasyim Asy'ari merupakan penentu arah dalam pengerahan massa santri dalam melawan penjajah dan sebagai kunci dalam menggerakkan santri-santri dan masyarakat dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Beliau yang menyulut rasa kebangsaan santri-santrinya di Tebuireng untuk berperang melawan penjajah. Dengan fatwanya "Resolusi Jihad", KH. Hasyim Asy'ari

menghimbau dan mengajak para santri pejuang untuk berjihad fishabilillah melawan penjajah yang kemudian melahirkan peristiwa perang besar yang dikenal sebagai Hari Pahlawan 10 November 1945.

Perlawanan yang mereka sebut sebagai jihad ini bukan semata-mata didasarkan pada kepentingan agama, melainkan kewajiban sebagai warga negara sebagai wujud cinta tanah air (nasionalisme) dan suatu semangat untuk menegakkan kebenaran dan melenyapkan segala bentuk kemungkaran dengan jalan yang telah ditentukan oleh Allah, meskipun harus dengan jalan perang. Dalam kisah al-Baqarah ayat 126, dijelaskan:

Keterlibatan kyai dan santri menjadi kekuatan kultural yang efektif melawan penjajah. Puncaknya, mereka menjadi pelopor terdepan ketika membangun gerakan nasional. Dalam hal ini, nilai-nilai nasionalisme santri yang dimaksud dalam artikel adalah semangat juang para santri-santri di pesantren untuk ikut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, karena tidak banyak buku-buku sejarah yang mengulas tentang keikutsertaan para kyai dan santri dalam memperjuangkan kemerdekaan.⁵⁹

Disamping keuntungan tersebut peranan kyai atau ulama (NU) dalam kenegaraan sangat kuat, itu terlihat dalam setiap langkah yang diambil oleh kyai selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara.

Pada waktu Belanda menjajah dan semakin memperluas genggamannya di Nusantara. Maka bangkitlah perlawanan terhadap belanda. Ada empat perlawanan yang dilakukan oleh kaum santri: Perang Paderi, Perang Diponegoro, Perang

⁵⁹ Nurida Ismawati, Warto, *Nilai-nilai Nasionalisme Santri dalam Film sang Kyai*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), Hal. 7.

Banten, dan Perang Aceh. Semuanya berlangsung pada abad ke-19. Disaat kesadaran nasional belum dikenal, agama Islam melalui semboyan *hubbul wathon minal iman* (cinta tanah air adalah sebagian dari iman) menjiwai motif perlawanan. Dalam kasus perang Diponegoro (seorang pangeran), tampak bahwa hubungan antara kraton dan ulama cukup akrab. Perubahan situasi tidak mempengaruhi peranan, bahkan peranan ulama makin kuat, yang berbeda adalah orientasi dan visi. Memang, akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 situasi telah berubah. Hal ini terutama disebabkan perubahan kebijakan politik Belanda (*inlandsch politiek*) akibat terpengaruhi oleh asumsi Hurgronje yang sangat menentukan. Yaitu, bahwa Islam tidak berbahaya sebagai agama, bahkan pada dasarnya bersifat damai, tetapi berbahaya secara politik.⁶⁰ Peranan NU yang menyangkut masalah kenegaraan pada masa penjajahan Belanda dapat dilihat pada Muktamar NU ke-11 di Banjarmasin pada tahun 1936. Dalam muktamar tersebut ditetapkan bahwa Hindia Belanda (Indonesia) dapat dinamakan sebagai “Negara Islam”. Alasan Muktamar pada saat itu adalah bahwa Indonesia telah pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam. Disamping itu, muktamar juga menetapkan bahwa Negara dan tanah air Hindia Belanda wajib dilestarikan menurut fiqih. Keputusan NU yang mengharuskan kaum santri membela keutuhan Hindia Belanda itu sebenarnya dibuat karena dua alasan. *Pertama*, pemerintah kolonial Belanda tidak pernah secara verbal menyuruh umat Islam berbuat kufur. *Kedua*, fakta bahwa umat Islam berada di Hindia Belanda kendati telah

⁶⁰ Martahan Einar Sitompul, *NU Pancasila*, Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2010, Hal: 21-22.

dikukuhkan sebagai satu bangsa pada sumpah pemuda 1928, tetapi masih berada di bawah kekuasaan Belanda.

Keputusan Mukhtamar NU itu juga menjadi bukti bahwa NU mengakui nasionalisme Hindia Belanda. Meskipun Indonesia pada saat itu secara formal bukanlah Negara Islam, bahkan belum merdeka, karena masih berada dalam genggaman penjajah, namun bagi NU, mempertahankan tanah air adalah sebuah kewajiban agama. Dari sinilah terlihat bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka, NU telah menyuarakan dengan tegas dan jelas tentang paham kebangsaan (nasionalisme) di Indonesia.⁶¹

⁶¹ Setiawan Zudi, *Loc. Cit.*, Hal. 131.

HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA

BAB III

DAPAT DIAKSES MELALUI

UPT PERPUSTAKAAN UNWAHAS

BAB IV

PENUTUP

Setelah dikemukakan berbagai uraian dan pokok permasalahan di atas tentang hubungan agama dan Negara, peran Agama dalam kenegaraan, dan peran Negara untuk Agama menggunakan metode wawancara dengan para kyai NU yang ada di Kabupaten Demak, pada bab ini penulis akan menyimpulkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan:

D. Kesimpulan

Di dalam pembahasan ini, penulis akan menyimpulkan dari hasil penelitian penulis di lapangan sesuai dengan teori yang penulis paparkan pada bab kerangka pikir. Hasil yang penulis dapat yaitu; bahwa hubungan Agama dan Negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling membutuhkan dan melengkapi. Agama dapat dikatakan sebagai pondasi kenegaraan sedangkan Negara sebagai penjaganya. Agama tanpa Negara akan sia-sia. Karena untuk menegakkan berbagai perintah, anjuran maupun menghindarkan larangannya secara optimal perlu keterlibatan Negara. Sebaliknya Negara tanpa Agama akan hancur. Karena agama membekali pemeluknya dengan kelengkapan aturan sesuai posisi masing-masing untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Agama merupakan prinsip yang menjadikan landasan bagi para pemeluknya untuk melakukan amal terbaik sesuai bidang masing-masing, termasuk para

penyelenggara Negara dalam menentukan kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi warganya.⁷⁷

Jadi bicara masalah hubungan agama dan Negara di Indonesia pasti tidak akan lepas dari NU, dari sejarah yang sudah di torehkan NU dalam memperjuangkan Negara Indonesia dan bangsa Indonesia yang dulu di jajah oleh bangsa asing.

Dari hasil wawancara penulis dengan para kyai, penulis menyimpulkan bahwa Suatu Negara akan aman tentram kalau Negara itu beragama, karena agama mengajarkan para pemeluknya sebuah ajaran moral, norma-norma, etika, sopan santun, saling menghormati, saling menghargai, dll. Agama itu mempersatukan bangsa, dengan agama bangsa Indonesia akan damai, kalau sudah bersatu maka segala urusan akan lebih mudah, bisa di kerjakan secara gotong royong. Kurangnya pondasi Agama akan menghancurkan persatuan bangsa, seberapa getol pemerintah mengajarkan pendidikan kepada masyarakat ketika tidak ada pondasi Agama, maka yang ada pembohongan dimana-mana, memanfaatkan ilmunya untuk kepentingan mencari harta semata.

Agama yang ada di Indonesia merupakan agama yang bertujuan untuk membela tanah air berpedoman dengan pancasila dan undang-undang dasar 1945. Sejak belum berdirinya Negara Indonesia, para tokoh agama Islam berjuang keras melawan penjajah, para tokoh agama Islam rela mati di bandingkan harus mengikuti permintaan para penjajah, tidak hanya itu, para santri juga ikut berjuang melawan penjajah, karena saking takdimnya kepada para guru para santri

⁷⁷ Tim Bahtsul Masail Himasal (Himpunan Alumni Santri Lirboyo), *Loc. Cit.*, hal. 12

ikut berjuang bersama. Dasar Negara Indonesia itu juga para kyai ikut mencetuskan dan menyetujui pancasila sebagai Ideologi Negara, pancasila sebagai asas tunggal tidak bisa diganggu gugat.

Peran agama dalam mempertahankan keutuhan NKRI itu melalui ajaran moralitas, etika, budaya, toleransi, gotong royong saling membantu, saling menghormati sesama, menjunjung tinggi kesatuan, dsb. Karena bagaimanapun kita tidak bisa menolak bahwa Indonesia lahir dari bermacam-macam suku bangsa, bahasa, budaya. Media yang digunakan dalam mengajarkan ajaran-ajaran tersebut biasanya melalui dakwah di dalam pengajian-pengajian, ngaji di pondok-pondok, acara-acara di Desa misalnya yasinan, tahlilan, manaqib dll.

Peran lain agama untuk Negara yaitu ketika melihat sejarah berdirinya Negara juga karena peran agama, militansi, loyalitas masyarakat terhadap Negara ya juga karena ajaran agama, tidak akan mungkin bisa guyub rukun warga Negara Indonesia tanpa ajaran-ajaran agama, ya bisa dikatakan Negara Indonesia adalah Negara agama yang berlandaskan hukum dalam menjalankan pemerintahannya.

E. Saran

Dari hasil penelitian di lapangan pasti akan memunculkan gagasan baru yang berupa kritik dan saran dari penulis untuk kemajuan dan untuk menjadikan kabupaten Demak yang lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis ingin menyampaikan saran tentang hubungan agama dan Negara di Kabupaten Demak yang berupa sebagai berikut :

1. Pemerintah harus memberikan ruang untuk para kyai, ulama, umara' untuk media berdakwah agar para kyai, ulama, umara' bisa senantiasa memberikan ajaran-ajaran moralitas, etika, budaya, toleransi, gotong royong saling membantu, saling menghormati sesama, menjunjung tinggi kesatuan, dsb kepada masyarakat, karena dirasa para kyai, ulama, umara' sangat membutuhkan media untuk bisa mengajarkan ajaran agama kepada masyarakat di kabupaten Demak.
2. Pemerintah harus membuat kebijakan terkait kewajiban masyarakat untuk meneladani ilmu-ilmu keagamaan, artinya pemerintah tidak hanya menekan masyarakat wajib berpendidikan formal saja melainkan pemerintah juga menekankan kepada masyarakat untuk juga meneladani ilmu keagamaan, kita sadari bahwa ilmu agama sangatlah penting bagi kita dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat karena dari ajaran ilmu agama yang sedari kecil telah diberikan kepada kita menjadikan kita sebagai manusia yang mampu menghormati manusia yang lain, menjadikan kita sebagai manusia yang gemar

menolong, menjadikan kita sebagai manusia yang rendah hati tidak sombong, dll.

3. Pemerintah harus tegas menangani permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan moralitas pemimpin pemerintahan, radikalisme yang membuat perpecahan, ajaran-ajaran agama yang mengarah pada radikalisme. Karena dari permasalahan-permasalahan tersebut akan menjadikan bangsa Indonesia pecah, mulai dari masyarakat yang tidak percaya kepada pemerintahan, masyarakat yang saling menuduh kepada masyarakat lain, masyarakat yang akan saling membenci sesama, maka dari itu pemerintah menjadi wajib memberantas permasalahan-permasalahan yang berhubungan moralitas bangsa, baik di tataran pemerintahan, maupun di tataran masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Adip Kholidul, *Semangat Membangun Demokrasi Jejak Politik Kiai Dalam Pilkada Langsung Kabupaten Demak Tahun 2006*, Demak: Gelora Press, 2007, hal. 45-47
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Edisi Revisi V*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asyhari, *Relasi agama dan Negara dalam konteks pendidikan*, Semarang: Fatawa Publishing, 2016, Hal. 112-113.
- Budiarjo Miriam, *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Palmerah Barat Jakarta, 2008
- Conolly, Peter, *Pendekatan Studi Agama*, Terj. Imam Khoiri, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Damam, Rozikin, *Membidik NU, Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Gema Insani Press, Kalibata Jakarta, 2001.
- El-Wa, Mohamed S., *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, Terj. Anshori Thajib, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983.
- Fealy, Greg, dan Greg Barton (ed), *Tradisi Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama – Negara*, Terj. Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1995.

- Hussain Syaikat, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj. Abdul Rochim CN., Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Latif Bustami, M.Si., *Kyai Politik politik Kyai*, Pustaka Bayan Malang, 2009
- Martahan Einar Sitompul, *NU Pancasila*, Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2010, Hal: 21-22.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.
- Nurani Soyomukti, "NU dan Visi Kebangsaan di Era Neoliberal", dalam Majalah Perspektif, Edisi 142, Desember 2007, hlm. 12.
- Qodir Zuli, *Islam Liberal Paradigma Baru Wacana dan Aksi Islam Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, halm 2007
- Ridho Imawan Hanafi, "NU dan Penghidmatan Kebangsaan", dalam Media Indonesia, Edisi Jumat, 1 Februari 2008, hlm. 4.
- Rodli Ahmad, *Stigma Islam Radikal*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2013
- Salim, Abd. Mu'in, *Fiqh Siyasah, Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Setiawan Zudi, *Nasionalisme NU*, Aneka Ilmu Semarang, 2007
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Edisi 5, Jakarta: PT. UI Press, 1993.
- Sulistiono, *Mengenal masjid Agung Demak dan Penyebaran Islam di Jawa*, CV. Pelangi Publishing Semarang, 2009, hal 5-7

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam* ,Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Sumber Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi

Ilmi Miftahul, *Skripsi Persepsi Ulama NU Tentang Sistem Khilafah*, h. 48

Jumandhoni Hari, *Skripsi “Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus dalam Partai Perindo”*, Semarang: Universitas Wahid Hasyim, 2016, h. 31.

M. Hafidz Ghozali, *Skripsi Hubungan Agama dan Negara Studi Atas Muqaddimah Ibn Khaldun*, Tahun 2008, h. 191.

Zidni Muhammad Ferdiansyah, *Skripsi “Perilaku Pemilih (Dinamika Pilihan Rasional Dalam Kemenangan Jokowi-Basuki Pada Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta)”*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014, h. 10.

Sumber Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Persepsi>, diakses pada tanggal 06 Mei 2018, pukul: 12:49 WIB.

<http://archieslow.wordpress.com/2011/11/08/definisi-ulama-ustad-dan-kyai/>, diakses pada tgl 31 Maret 2013 Pkl 09.00 WIB.

<http://granadaprivat.wordpress.com/tag/kyai/> akses tgl 24 April 2013 jam 23.30 Wib.

<http://serbasejarah.blogspot.com/2011/09/antara-NU-dan-Muhammadiyah.html> di akses pada tanggal 14 Juli 2013, Pada pukul 02.35 WIB.

<http://emka.web.id/ke-nu-an/2011/said-aqil-siradj-agama-tidak-hanya-mengurusi-aqidah-dan-syariah/>, di akses tgl 28 agustus 2013, pukul 01:15 WIB.

<http://kelompoktujuhbetokan.wordpress.com/about/bab-3-gambaran-umum/gambaran-umum-kabupaten-Demak>, di akses pada tanggal 4 Desember 2013, pukul 01:29 WIB.

Lain-lain

Masruhan, *Artikel Pemikiran Kyai NU tentang Relasi Agama dan Negara*”, Al-Qanun, Vol. 12, No. 1, Juni 2009

Tim Bahtsul Masail Himasal (Himpunan Alumni Santri Lirboyo), *”Fikih Kebangsaan Merajut Kebersamaan di Tengah Kebhinekaan”*, Kediri: Lirboyo Press dan LTN Himasal Pusat, 2018, hal. 12

Mudzakir Murtadho, *Wawancara*, tanggal 28 November 2018, Jam 13.00-14.12 WIB.

Dimiyati Suyuti, *Wawancara*, tanggal 28 November 2018, Jam 18.15-18.50 WIB.

Sholihin, *Wawancara*, tanggal 29 November 2018, Jam 09.10 – 09.45 WIB.

Sa'dulloh *Wawancara*, tanggal 29 November 2018, Jam 11.00 – 11.50 WIB.

Subakhir, *Wawancara*, tanggal 29 November 2018, Jam 18.15-18.50 WIB.